

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bergulirnya era reformasi seiring dengan tumbangnya orde baru dibawah pimpinan presiden soeharto membawa perubahan yang signifikan dalam perpolitikan indonesia dalam sebuah sistem demokrasi. Ini terjadi setelah naiknya BJ Habibie sebagai pengganti soeharto yang waktu itu menjabat sebagai wakil presiden republik indonesia. Perubahan yang sangat mendasar dalam peta perpolitikan indonesia terutama terjadinya liberalisasi politik. Liberalisasi ini bukan dilakukan secara murni oleh habibie tetapi lebih kepada sebuah keterpaksaan dari pihak oposisi. Ada beberapa kebijakan “mulia” yang dilakukan oleh mantan menristek ini. Pertama melaksanakan pemilihan umum secara demokratis (jujur dan adil), pembebasan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol), kebebasan pers serta pembubaran dwi fungsi Abri.

Dalam konteks pemilihan umum pemerintah habibie mengeluarkan keputusan No. 5/1998 dan No.12/1998 yang memberikan garansi formal bagi netralistik pegawai negeri. Munculnya beberapa aturan baru dalam politik membawa perubahan besar dalam partai politik. Di bawah kekuasaan habibie lahir ratusan partai politik yang inginterlibat dalam pemilu. Tetapi hanya berhak hanya 48 partai yang boleh ikut termasuk partai golkar dengan urutan 23.

Munculnya partai baru membawa euforia kepada warga negara indonesia setelah soeharto tumbang dari tampuk kekuasaan tunggal dan rakyat bebas

menentukan sikap untuk memilih dan memberikan jaminan dalam penggunaan hak suara tanpa intimidasi dan diskriminasi.

Walaupun belum sempurna dan masih jauh dari yang diharapkan, perubahan kearah demokrasi sudah semakin nampak. Cuma perlu pembenahan dan infrastruktur pendukung.

Terjadinya perpindahan kekuasaan dari soeharto ke BJ habibie, tuntutan dan gejolak bukan semakin mereda. Tetapi terus terjadi dan mendesak BJ habibie segera melakukan pemilihan umum. BJ habibie masih terbilang sebagai keturunan masa orde baru dan perpanjangan tangan dari soeharto. Sehingga sangat sulit untuk melakukan reformasi total terutama terhadap sistem perpolitikan. Melalui sidang istimewa MPR 1998 dihasilkan sebuah keputusan untuk melaksanakan pemilihan sebagai alternatif yang dilaksanakan pada tanggal 7 juni 1999.

Keinginan rakyat untuk mempercepat pelaksanaan pemilu terjadi berbagai pandangan dan pendapat dari pro demokrasi dengan pro pemerintah. Pro demokrasi menganggap percepatan pelaksanaan pemilu merupakan sebuah alternatif dalam jeda demokrasi. Sedangkan pro pemerintah beranggapan pemilu seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002 karena masa jabatan BJ habibie selaku penerus mandat dari soeharto mempunyai jabatan 5 tahun semenjak ditetapkan hasil pemilu tahun 1997. Pro pemerintah menyatakan bahwa lebih memfokuskan diri untuk membenahi krisis ekonomi serta melakukan reformasi diberbagai bidang.

Salah satu tuntutan dari pro pemerintah tersebut adalah mendesak melaksanakan pemilu pada tanggal 7 juni tahun 1999. Pemilu tahun 1999 ini

diikuti oleh 48 partai politik dengan aliran dan ideologi yang berbeda. Bahkan ada juga partai uni demokrasi indonesia (PUDI) pimpinan sri bintang pamukas yang pernah menjadi tahanan politik era soeharto karena dianggap membangkang.

Pemilu tahun 1999 berada dari pemilu sebelumnya, partai politik bebas melakukan kampanye, pawai massa, ber orasi serta mendapatkan massa yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi. Bahkan beberapa orang tokoh nasional juga mendirikan partai sendiri. Dari 48 partai politik 35 merupakan partai baru.

Pada umumnya, partai-partai baru itu berpandangan, pada akhir era orde baru, kondisi bangsa kian memprihatinkan, yang ditandai oleh (1) kegagalan dalam mengembangkan demokrasi kerakyatan dimana kebijakan pemerintah belum menyentuh kehidupan masyarakat paling bawah, (2) Kegagalan dalam penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia (HAM), (3) Terjadinya sentralistik dalam pemerintahan negara, sehingga segala sesuatunyahanya ditentukan oleh kemauan Presiden Soeharto, (4) kegagalan dalam mengelola sistem kepartaian, sehingga Golkar menjadi partai hegemonik, (5) kegagalan dalam sistem sosial-budaya yang ditandai oleh kegagalan sistem pendidikan nasional, Dan (6) last but not least, kegagalan dalam membangun sistem ekonomi, yang ditandai semakin melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi. (Widjanarko Puspoyo, 2012:283-284).

Sebagai gambaran rill, Pemilu 1999 pemenaangnya PDI-P Meraih 35.689.073 suara (33,74%), memperoleh 153 kursi DPR, Partai Golkar memperoleh 23.741.758 suara (22,44%) mendapat 120 kursi DPR, Partai

Kebangkitan bangsa (PKB) memperoleh 13.336.982 suara (12,61%), mendapat 51 kursi DPR, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 11.329.905 suara (10,71%) mendapatkan 58 kursi DPR atau kehilangan 31 kursi dibanding pemilu 1997, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pendatang baru meraih 7.528.856 suara (7,12%) mendapat 34 kursi DPR. Di luar lima besar partai-partai itu, partai lama yang masih eksis adalah Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) sebelumnya bernama PDI, suara merosot tajam hanya meraih 2 kursi DPR, kehilangan 9 kursi dibanding pemilu 1997. (Widjanarko Puspoyo, 2012:288-289).

Kursi parlemen yang biasanya oleh tiga partai politik, Abri, utusan daerah dan utusan daerah (non fraksi), kini sudah diisi oleh aneka ragam partai politik dengan ideologi dan visi yang berbeda. Inilah sebuah prestasi yang prestisius yang dilahirkan oleh kebijakan BJ Habibie.

Berangkat dari situ, perjalanan demokrasi Indonesia semakin berbenah dengan melakukan berbagai perombakan terhadap sistem pemilu termasuk lahirnya peraturan pemerintah (PP) No 06 tahun 2005 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah hasil amandemen UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan aplikasi dari kata demokratis hasil amandemen UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4) bahwa gubernur/ wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati di tingkat provinsi, kab/ kota dipilih secara demokratis.

Lahirnya PP No. 06/ 2005 ini membawa kita pada sebuah arena perpolitikan yang dinamis dan bermutu. Sebab dengan keterlibatan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan politik melalui pemungutan suara diharapkan pemimpin yang dilahirkan benar-benar bermutu dan mempunyai loyalitas, profesional memiliki kapabilitas untuk memajukan daerahnya. Rakyat sebagai stakeholder dalam pemilihan kepala daerah (Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung) diharapkan mampu menjalankan amanah dan mempunyai peran penting untuk lebih menciptakan pemimpin yang betul-betul mampu menjalankan roda pemerintahan untuk kemajuan suatu daerah.

Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan pemilu ini tidak serta merta berarti proses demokrasi di indonesia juga berhasil atau terkonsolidasi. Hal ini diungkapkan oleh Willam Lidle yang mengatakan bahwa demokrasi di indonesia belum terkonsolidasi dengan baik. Keharusan demokrasi ditambah Lidle adalah menjadi sistem yang normal dalam kanca perpolitikan indonesia sekarang ini (dalam proyono, dkk, 2007:43-44). Salah satu demokrasi menurut John Locke (1632-1704) adalah prinsip trias politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain (Miriam budiardjo, 2004: 151).

Harus disadari bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan langkah maju dalam perkembangan demokrasi di indonesia, ia menjadi pilihan strategis setelah bentuk lain dari demokrasi itu sendiri sepanjang pemilu indonesia. (Muhadam Labolo, 2010:128-129)

Di era moderenisasi ini banyak persoalan yang di hadapi dalam kehidupan bermasyarakat baik secara individual maupun sosial yang menyangkup pola hidup dan tatanan kehidupan yang dijalannya. Hal ini banyak berkaitan dengan adanya sistem yang berlalu baik dari norma adat, budaya, agama, maupun hukum.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai pasal 110 No 3 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No.32 Tahun 2004 yang berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut dalam konteks eksplisit di muat dalam undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan di tambah petunjuk teknis melalui peraturan pemerintah No 6 tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam undang-undang tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya di sebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan atau kabupaten berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar (UUD) negara reepublik indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Salah satu daerah kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung adalah kabupaten indragiri hilir yaitu tepatnya pada tanggal 4 september 2013 lalu. Pemilihan kepala daerah (pilkada) kali ini merupakan awal dari terciptanya demokratisasi dan budaya politik lokal dalam sistem perpolitikan tanah air di indragiri hilir. Menurut pakar politik arbi sanit, ada tiga golongan kepentingan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu (a) kepentingan elit politik nasional, (b) kepentingan elit politik lokal, dan (c) kepentingan rakyat kebanyakan. Beberapa daerah di indonesia yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara untuk jabatan Gubernur atau Bupati/Walikota menyisakan banyak catatan terhadap perkembangan dan keberlangsungan demokrasi. Satu diantara pilar di sebutkan sanit adalah kepentingan rakyat tenggelam oleh dominasi kepentingan para elit yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut (dalam Priyono dkk, 2007:74).

Dari pantauan dan pengamatan di beberapa daerah pemilihan di indragiri hilir atas laporan warga terdapatnya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) misalnya adanya isu Money politik, intimidasi terhadap warga eks-transmigrasi dan masih banyak laporan pelanggaran lainnya (panwas pemilihan kepala daerah (pilkada) indragiri hilir, 2013). Jika diprediksi dari 330 daerah kab/kota yang sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah, pemilihan kepaala daerah (pilkada) di kabupaten indragiri hilir penulis meyakini tergolong sukses tanpa ada kerusuhan dan konflik yang berlarut-larut seperti daerah lainnya di indonesia.

Peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) indragiri hilir terdiri dari 4 pasangan calon, yaitu (1) H. Muhammad Wardan berpasangan Rosman Malomo (2) Edy Syafwannur berpasangan Agus Salim (3) Syamsudin Uti berpasangan Muslimin (4) Zainal Abidin berpasangan Said Ismail. Keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati di atas terdiri dari berbagai profesi, ada dari birokrat, politisi dan pengusaha. Partisipasi politik di mekarsari dalam pemberian suara terhadap masing-masing calon bupati dan wakil bupati terdistribusi secara bervariasi.

Pada pemilihan kepala daerah di desa mekarsari kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir tercatat jumlah tiap dusun yang mempunyai hak pilih adalah sebanyak 679 orang dan di tambah 1 orang yang memilih di TPS 1 tepatnya di dusun polewali dari TPS lain sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 : Jumlah penduduk desa yang mempunyai hak pilih dari desa mekarsari tahun 2013**

No	Nama Dusun	Penduduk yang mempunyai hak pilih	Penduduk yang tidak menggunakan hak pilih	Persentase yang tidak menggunakan hak pilih
1	Mase-Mase	147	42	22 %
2	Polewali	115	46	24 %
3	Terusan Jaya	279	76	39 %
4	Sederhana	139	30	15 %
5	Sabar Jaya	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>680</b>	<b>194</b>	100 %

*Sumber: Panitia pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten indragiri hilir desa mekarsari 2013*

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah penduduk desa mekarsari berdasarkan dusun yang memiliki hak pilih yaitu Dusun Mase-Mase 147 orang yang memiliki hak pilih dan 42 orang yang tidak menggunakan hak pilih, Dusun Polewali 114

orang di tambah dari 1 orang dari TPS lain jadi totalnya 115 orang yang memiliki hak pilih dan 46 orang yang tidak menggunakan hak pilih, Dusun Terusan Jaya 279 orang yang memiliki hak pilih, dan 76 orang yang tidak menggunakan hak pilih, dan Dusun Sederhana 139 orang yang memiliki hak pilih dan 30 orang yang tidak menggunakan hak pilih.

Untuk dusun sabar jaya kenapa pemilihnya tidak ada, itu disebabkan karna beberapa faktor, diantaranya: Pertama, di dusun sabar jaya merupakan dusun yang tertinggal pembangunannya hingga dapat dikatakan tidak ada pembangunan baik jalan ataupun jembatan penghubung antar parit ke parit yang lainnya sehingga menghambat warga dusun sabar jaya untuk berintraksi dan ikut memilih di TPS yang ada di dusun sederhana, Kedua, jumlah penduduk yang sangat sedikit jumlahnya dan bisa dikatakan hanya satu keluarga yang tinggal disana, Ketiga, dusun sabar jaya ini merupakan dusun yang berbatasan dengan desa sebrang pulau kijang sehingga penduduk didusun sabar jaya lebih banyak berintraksi dengan warga desa sebrang pulau kijang.

Untuk melihat jumlah surat suara yang diberikan oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2 : Surat suara yang diberikan oleh masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten indragiri hilir kecamatan reteh desa mekarsari tahun 2013**

No	Nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah	Surat suara yang sah	Surat suara yang rusak/ tidak sah	Surat suara yang tidak masuk	Persentase surat suara yang sah
1	Wardan – Rosman Malomo	164	6 1,25 %	194 28,52%	35 %
2	Edy Syafwannur – Agus salim	197			41 %
3	Syamsudin uti – Muslimin	94			20 %
4	Zainal Abidin – Said Ismail	25			6 %
<b>Jumlah surat suara</b>		<b>480</b>	<b>6</b>	<b>194</b>	<b>100 %</b>
<b>Jumlah daftar pemilih tetap</b>		<b>680</b>			

*Sumber: Panitia pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten indragiri hilir desa mekarsari 2013*

Dari tabel diatas dapat dilihat Wardan-Rosman Malolomo mendapat suara 164 atau (35%), Edy Syafwannur-Agus Salim mendapat 197 suara atau (41%), Syamsudin Uti-Muslimin mendapat suara 94 atau (20%) dan Zainal Abidin-Said Ismail Mendapat Suara 25 atau (6%). Surat suara yang tidak sah (6) atau (1,25%) dan surat suara yang tidak masuk (194) atau (28,52%).

Berdasarkan Wawancara penulis dengan Bapak H.Sony salah seorang tokoh Masyarakat dan Aktif di Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kecamatan Reteh, Menanggapi Hasil Kemenangan Pasangan H. Muhammad Wardan berpasangan dengan H. Rosman Malomoyang di pemilukada kabupaten Inhil Khususnya di kecamatan Reteh, *“bahwasanya dengan terpilihnya Pasangan H.M Wardan-H. Rosman Malomo kita mengharapkan Perubahan Pembangunan lebih baik khususya dibidang Pembangunan Jalan dan mengharapkan anggaran dan bantuan dari pemerintahan kabupaten itu sendiri di learisasikan secara sempurna dan tidak ada lagi potongan-potongan anggaran”*

(Hasil Wawancara 18 September 2014)

Seterusnya melihat kondisi dan peran partisipasi masyarakat di desa mekarsari yang masih kurang efektif maka dari itu di pandang perlu Mewawancarai Masyarakat desa mekarsari, Bapak Sualaimana salah seorang Ketua KPPS TPS 1 dan masyarakat desa mekarsari, sebagai dasar awal penelitian bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik di desa mekarsari kecamatan reteh kabupaten inhil beliau mengatakan *“Dalam pemiihann kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Tahun 2013 masyarakat banyak mengeluhkan masalah ekonomi di mana ada sebagian masyarakat yang bekerja di luar desa dan akhirnya tidak bisa mengikuti pencoblosan karna mengingat biaya yang mereka butuhkan untuk pulang kampung itu, dan ada juga masyarakat yang memang benar benar malas datang ke TPS atau lebih mementingkan bersantai di rumah, serta masyarakat yang tidak patuh dengan hukum atau peraturan”*.

(Hasil Wawancara Selasa 24 Desember 2013).

Berhubungan karena agenda penyelenggaran pemilihan kepala daerah merupakan momentum yang strategis dalam upaya mewujudkan demokratisasi di daerah, maka proses pemilihan kepala daerah tersebut semestinya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam proses pemiihan kepala daerah di desa mekarsari yang dilaksanakan 4 September 2013 yang lalu, penulis mengamati dilapangan masih diwarnai dengan berbagai dinamika dan fenomena yang dianggap dapat merusak nilai-nilai demokrasi ditengah kehidupan masyarakat didesa mekarsari.

Adapun fenomena yang penulis dapat setelah melakukan pengamatan saat pemilihan kepala daerah di desa mekarsari antara lain:

1. Tahapan sosialisasi panitia pemiihan kepala daerah yang kurang kepada masyarakat sehingga informasi tentang akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah masih ada yang tidak diketahui masyarakat.

2. Masyarakat kurang mengetahui visi dan misi masing-masing kandidat Kepala Daerah.
3. Partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah kurang, hal ini penulis amati berdasarkan tabel I.2 diatas fakta masih besarnya jumlah masyarakat yang tidak ikut memilih/ tidak memberikan hak suaranya sewaktu pemilihan kepala daerah di desa mekarsari berlangsung hanya diikuti 480 orang dari 680 orang daftar pemilih tetap.
4. Masih adanya *black campaigning* (Kampanye Hitam) hal ini dibuktikan dengan adanya pasangan kandidat saling menjatuhkan citra kandidat kepada masyarakat.
5. Disisi lain penulis juga menemukan adanya unsur *Money Politic* (politik uang) yang dilakukan oleh calon kepala daerah.

Salah satu masalah besar yang sering menjadi persoalan dalam bermasyarakat adalah kecenderungan individu-individu dalam masyarakat mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki mencerminkan ketidakpedulian individu-individu dalam masyarakat terhadap kehidupan masa depan seperti pemilihan kepala daerah di Indragiri Hilir tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik serta perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA**

**DAERAH (PILKADA) PERIODE 2013-2018 DI DESA MEKARSARI  
KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode 2013-2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragir Ihilir ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala (Pilkada) periode 2013-2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode 2013-2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragir Ihilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode 2013-2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragir Ihilir.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai tambahan penulis dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang di dapatkan selama kuliah khususnya dibidang partisipasi politik masyarakat dalam pilkada (bupati dan wakil bupati).
2. Sebagai bahan informasi untuk melihat sejauh mana partisipasi politik masyarakat desa mekarsari dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di kabupaten indragiri hilir untuk memilih bupati dan wakil bupati periode 2013-2018
3. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis menerangkan dalam bab denagn sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang erat hubungannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan waktu dan tempat lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini mengemukakan tentang luas dan batas wilayah, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, sarana perekonomian dan pemerintah.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dari penelitian tentang analisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2013 di desa mekarsari kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran guna mendukung keberhasilan dari penelitian tersebut.